

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

Public Participation In Development Planing Conference In Larantuka Sub-District East Flores District

Alexander Buditjahjono Gedeona

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Graduate Studies Program Indonesia Open University

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Larantuka bagian dari penyelenggaraan perencanaan pembangunan tingkat kecamatan berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang Kecamatan Larantuka. Aspek-aspek untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah bentuk partisipasi, kewenangan pengambilan keputusan dan cara pemberian usulan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, teknik wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Temuan penelitian ini adalah: (1) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kecamatan Larantuka secara umum belum optimal, dimana bentuk partisipasi berupa, pemberian ide serta gagasan dan bantuan tenaga secara langsung masih rendah; (2) Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarenakan terbatasnya forum dalam menampung usulan masyarakat; (3) Cara pemberian usulan, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi serta usulan kepada forum musrenbang masih rendah; dan (4) Partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan program pembangunan tertulis dalam bentuk proposal masih rendah. Saran dari hasil penelitian (1) Perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat desa; (2) Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat kecamatan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan; (3) Perlu adanya penyuluhan tentang pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (4) Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Desa dan Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat; dan (5) Perlu adanya mekanisme untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam perencanaan pembangunan sehingga diharapkan muncul program baru yang tidak hanya menekankan kegiatan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan non fisik.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

Musrenbang (Development Planing Conference) at the Larantuka sub-district level was part of Law Number 25 Year 2004 on National Development Planning System. Musrenbang represent a forum for a conference of stakeholders at the sub-district level. This study aimed at describing community participation in the planning process at the Larantuka sub-district. Aspects of community participation in the planning process were the format of participation, decision-making authority and method of submitting proposals. This study was descriptive qualitative. using, observation, interviews and document search to collect data. The results showed that: (1) community participation in the planning process at Larantuka sub-district in general does not run smoothly; where participation such as attendance, submission of ideas and physical assistance in planning meetings were still low; (2) lack of submission of ideas and suggestions from the community was because of the limited forum to accommodate proposals; and (3) the method of proposal submission, community participation in gathering information to be presented at the forum were still low: (4) participation of the community in submitting a written proposal to the forum was also low. This study suggested that (1) the forum should optimize the activities to identify problems and community needs. (2) the forum needed a training program for the village community regarding the mechanism of development planning (3) the community needed to be given counsel on the importance of its role in development planning. (4) information should be given continuously by empowering rural and sub-district officials, employees of local offices, and development cadres to distribute the necessary information to the community (5) there should be a mechanism to engage a wider community in the planning of rural development that were expected to emerge as a new program that not only emphasizes physical development activities, but also non-physical development

Keywords : *Public Participation, Development Planing.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah terjadi pergeseran pandangan dan praktek dalam tata kelola negara, yakni dari *government* menuju *governance*. Pergeseran tersebut ditandai oleh adanya peran multiaktor. Multiaktor yang dimaksud dalam perspektif *governance* dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yakni negara (*state*), swasta (*private*) dan masyarakat madani (*civil society*), yang terlibat atau berpartisipasi dalam tata kelola negara, termasuk dalam proses pembangunan. Karena asumsi yang digunakan adalah bahwa tata kelola negara yang baik (*good governance*) dalam mengatur sumber daya, memecahkan masalah-masalah publik (*public problems*) dan berbagai urusan publik (*public affairs*), dapat terwujud dengan baik apabila ada peran serta atau partisipasi dari aktor-aktor tersebut (Najib, M. 2005).

Terkait dengan penerapan pendekatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), juga mengoperasionalkan tuntutan penggunaan

pendekatan tersebut dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Marbyanto (2008) sebagai berikut:

“Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan pemerintah daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim”.

Permasalahan dalam perencanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Larantuka, yang melatarbelakangi arti penting dan relevansinya dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Permasalahan tersebut berdasarkan pengamatan sementara dan data sekunder yang ada meliputi antara lain adanya keluhan dari masyarakat terkait pengambilan keputusan atas usulan program atau kegiatan yang tidak banyak pihak yang terlibat, dan acapkali usulan kegiatan atau program dari kecamatan mendapat intervensi kepentingan dan kekuasaan dari para pengambilan keputusan di tingkat legislatif daerah maupun SKPD, yang pada akhirnya menyebabkan akuntabilitas proses dan hasil dari perencanaan sering dipertanyakan masyarakat. Misalnya pada kasus tidak terakomodirnya usulan masyarakat hasil musyawarah dari tingkat desa hingga pada tingkat kecamatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten

Alexander Abe (2002;24-25) menjelaskan mengenai konsep perencanaan sebagai berikut :“Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diurai beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan)”. Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

B. Perumusan Masalah

Untuk hal tersebut maka rumusan masalah yang dapat diformulasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur?”

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
2. Menganalisis aspek-aspek yang menjadi penghambat proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam

pengembangan ilmu administrasi publik, secara khusus terkait dengan konsep dan teori partisipasi masyarakat dalam manajemen pembangunan di tingkat daerah.

Sementara manfaat praktisnya adalah diharapkan agar riset ini dapat berguna sebagai informasi masukan bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dan secara khusus bagi Kecamatan Larantuka dalam melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, Hal ini seperti yang dikemukakan Sulaiman (Huraerah, 2008: 103), dimana partisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah:

a. Bentuk partisipasi

Pada tahapan ini bentuk partisipasi masyarakat yang bisa disumbangkan dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran, memberikan ide atau gagasan dalam penentuan usulan prioritas. Ide atau gagasan disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan hasil ide-ide tersebut akan diusulkan dalam penetapan usulan. Bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, saran, usulan maupun kritik dalam pertemuan atau rapat yang diadakan untuk membicarakan kegiatan yang akan

b. Kewenangan pengambilan keputusan

Peran masyarakat Perencanaan pembangunan sangat penting, diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

c. Metode/cara pemberian usulan

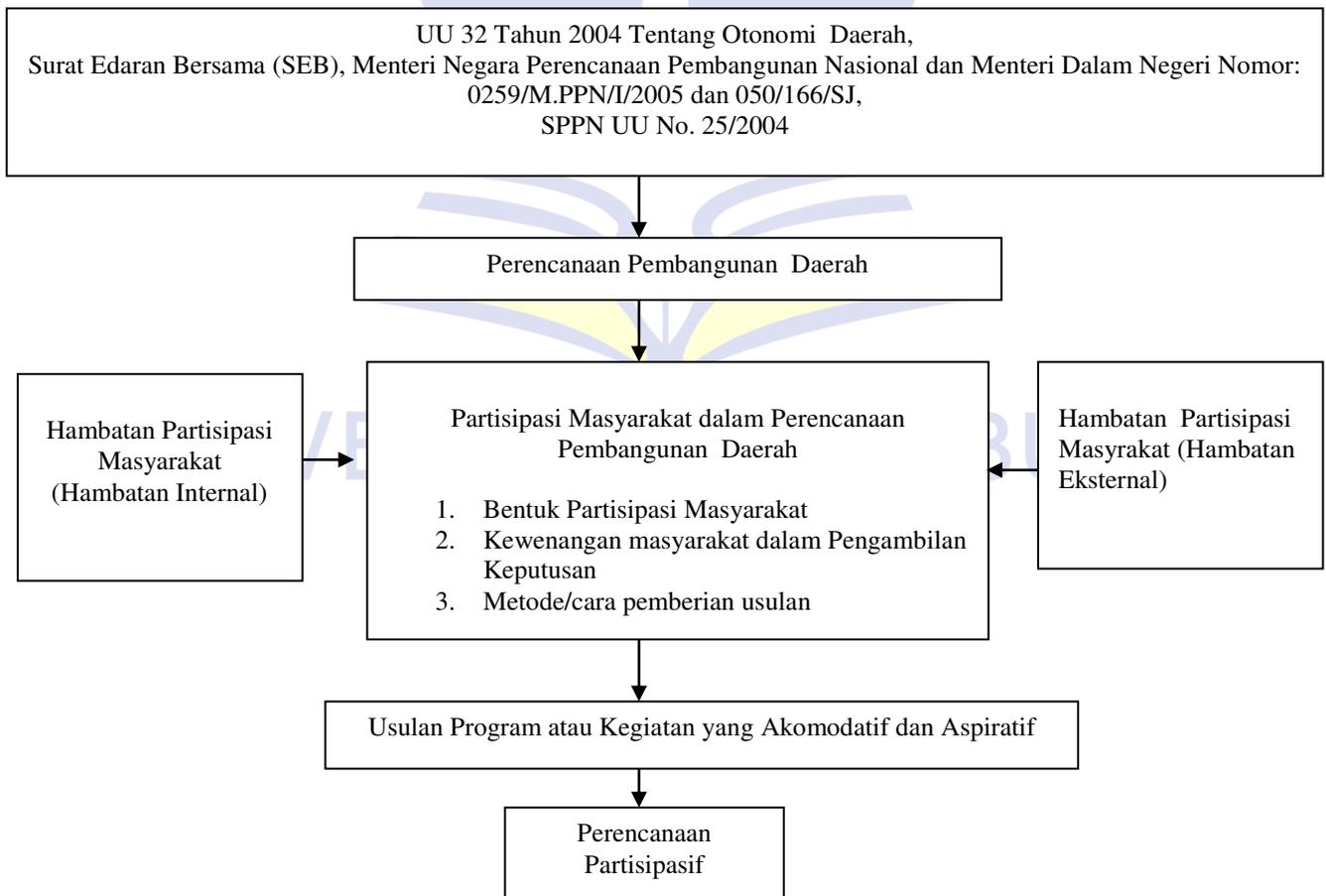
Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, Dan juga berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan tersebut maka dilakukan identifikasi dan penetapan permasalahan, menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Ada beberapa hal atau aspek yang disinyalir menjadi hambatan dan jika diatasi atau dikelola secara baik dapat menjadi aspek pendorong untuk terwujudnya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan. Aspek tersebut berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (intinsik/internal) maupun yang datangnya dari lingkungan luar (ekstrinsik/eksternal) atau lingkungan yang lebih makro, seperti yang dikemukakan oleh Soetomo (2009), "...bahwa dalam pelaksanaan pendekatan yang ingin memberikan peran lebih besar kepada masyarakat harus memperhitungkan berbagai permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Masalah-masalah tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat sendiri maupun berasal dari ruang lingkup yang lebih makro."

Sesungguhnya yang menjadi kendala juga adalah pada persoalan mengenai tingkat prioritas program mana yang dianggap penting. Dan jika membicarakan hal tersebut maka pembicaraan selanjutnya adalah kepentingan siapa yang harus diprioritaskan. Untuk menjawab hal tersebut, maka seringkali harus melihat kaitannya dengan berbagai aspek, termasuk didalamnya adalah aspek politik. Menurut pemikiran Conde (1979, dalam Soetomo 2009), aspek politik yang dimaksud adalah kemauan politik dari semua pihak untuk memberikan peluang kepada semua lapisan masyarakat sampai ke tingkat terbawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kerangka atau Model Berpikir Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan



Keberadaan peraturan perundangan-undangan yang ada, Pemerintah Daerah saat ini diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Harapan dari adanya partisipasi masyarakat tersebut agar usulan program atau kegiatan yang disampaikan dapat merupakan perwujudan dari permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana proposisi yang diajukan peneliti di atas bahwa perencanaan pembangunan yang baik dan efektif adalah perencanaan pembangunan yang terdesentralisasi dan demokratis yang digambarkan antara lain oleh adanya partisipasi masyarakat.

Diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan tidak selalu berjalan dengan baik dan efektif. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan aktivitas partisipasi masyarakat itu tidak optimal. Dalam penelitian ini, peneliti membaginya kedalam dua bagian yaitu, hambatan yang bersifat internal, yaitu hambatan yang datangnya dari dalam diri masyarakat, dan yang kedua adalah hambatan yang bersifat eksternal, yaitu hambatan yang datangnya dari luar masyarakat.

METODE PENELITIAN

A. Lingkup Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif didahului dengan suatu penelahan terhadap beberapa *stakeholders* seraya melakukan pengumpulan data tentang tindakan-tindakan mereka, kepentingan mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pikiran dalam hubungannya dengan sebuah fenomena tertentu, dalam hal ini berkenaan dengan masalah perencanaan pembangunan di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

B. Fokus Penelitian

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Beberapa hal atau aspek yang menjadi indikator dalam menjelaskan partisipasi masyarakat, yaitu: (a).Ada tidaknya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan.(b) Siapa saja yang berpartisipasi (c). Apakah ada keterwakilan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan dalam Musrenbang(d).Apa peran masyarakat dalam proses Musrenbang.(e).Bentuk partisipasi seperti apa yang diberikan masyarakat(f).Ada tidaknya kewenangan dalam menentukan atau pengambilan keputusan terkait dengan usulan program atau kegiatan di tingkat kecamatan.(g).Sejauhmana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan dalam menentukan usulan program/kegiatan di tingkat kecamatan(h).Ikut serta dalam menentukan lokasi kegiatan(i).Metode/cara pemberian usulan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

(a).Faktor intrinsik yang merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri individu masyarakat yang menyebabkan terhambatnya warga masyarakat dalam peran serta mereka pada musrenbang di tingkat kecamatan. (b). Faktor-faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang datang dari luar masyarakat yang menjadi kendala atau menjadi penghambat bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan..

C. Informan penelitian

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian:

1. Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid Penelitian serta Kabid Sosial budaya pada Bappeda Kabupaten Flores Timur
2. Camat Larantuka, Sekretaris Camat, Kasie Pemerintahan Masyarakat desa serta Kasie Pembangunan pada Kantor Camat Larantuka.
3. Kepala Desa Lamawalang, Lurah Kelurahan Larantuka, Sekretaris Lurah Kelurahan Weri.
4. LSM (fasilitator PNPM kecamatan Larantuka) terdiri dari 1 orang
5. Kaum intelektual dan Tokoh Masyarakat yang tahu betul perencanaan pembangunan di Kecamatan Larantuka, terdiri dari 3 orang.

D. Instrumen Penelitian

Peneliti sendiri menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dengan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bertujuan mengurai pokok persoalan secara detail. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan terlebih dahulu pokok-pokok wawancara sesuai dengan kompetensi informan, informan kunci. Teknik ini juga akan dibantu dengan sejumlah format pengisian data seperti catatan refleksif.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati dan mengikuti proses musrenbang di kecamatan Larantuka, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Melalui pengamatan peneliti dapat mengungkapkan fakta tentang penyelenggaraan musrenbang dan melihat bagaimana suatu proses Musrenbang kecamatan Larantuka, sehingga dapat menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses serta peserta.

Menggunakan Teknik analisis isi terhadap data sekunder yang ada melalui studi dokumen dan kepustakaan .mempelajari buku-buku, makalah yang berhubungan dengan topik penelitian serta Mengumpulkan dan mengcopy dokumen program/ kegiatan prioritas yang akan didorong pada forum tingkat kabupaten.

F. Analisa Data

Pada tahap reduksi data melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, kemudian dikelompok-kelompokkan menurut kategorinya. Dan data yang telah dikategorikan kemudian diklasifikasikan untuk diinterpretasikan guna memberi makna kepada usaha pengambilan kesimpulan penelitian setelah melalui verifikasi. Pada tahap penyajian data; peneliti menyajikan hasil reduksi data guna memahami hal yang diteliti yaitu pemahaman terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan Larantuka serta hambatanya. Melakukan penarikan kesimpulan setelah diverifikasi yang merupakan alur

penting ketiga dari kegiatan analisis data, kegiatan yang dilakukan adalah berupa penarikan kesimpulan setelah diverifikasi dari hasil reduksi data dan penyajian data di atas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Larantuka

Kecamatan Larantuka merupakan satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Flores Timur, berada di tengah-tengah Ibukota Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kec. Ile Mandiri; Sebelah Selatan : Selat Solor; Sebelah Timur : Selat Adonara; Sebelah Barat : Kecamatan Demon Pagong

Kecamatan Larantuka mempunyai luas wilayah 75,91 Km² terdiri dari lahan tanam 14 Ha, lahan panen 9 ha, dan lahan bukan sawah (lahan kering 1.675 Ha. Wilayahnya rata-rata memiliki ketinggian wilayah terendah 5 m dan tertinggi 27 m dari permukaan laut. Beriklim tropis dengan musim kemarau yang berkepanjangan Penduduk Kecamatan Larantuka pada tahun 2011 tercatat 37.821 jiwa. Dan desa/Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi pada Kelurahan Ekasapta (3407 Orang) sedangkan memiliki kepadatan penduduk terendah (761 Orang) pada Kelurahan Pohon Sirih.

B. Mekanisme Perencanaan Musrenbang Kecamatan Larantuka Penilaian Tahapan Persiapan pada Musrenbang kecamatan Larantuka

Persiapan yang dilakukan akan menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapun aspek-aspek yang diamati dan dievaluasi pada tahapan persiapan musrenbang diantaranya: keberadaan, kompetensi dan kualifikasi tim penyelenggara; proses musyawarah pembangunan, media untuk menyampaikan undangan dan informasi adanyamusrenbang dan ketersediaan jadwal, agenda musrenbang, serta daftar hadir. diketahui bahwa dari 10 kegiatan yang dirumuskan, ada 6 kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam proses persiapan musrenbang, sehingga prosentase penilaian tahap persiapan ini adalah $\frac{6}{10} \times 100\% = 6\%$. Hal ini menggambarkan bahwa persiapan musrenbang yang dilaksanakan belum dipersiapkan secara optimal. Salah satu faktornya adalah ketersediaan informasi bagi peserta belum dilakukan.

Penilaian Tahap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Larantuka

Dari 27 kegiatan yang harus dilalui dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan, hanya 18 kegiatan yang dilaksanakan, sehingga presentase $\frac{22}{27} \times 100\% = 81\%$. Dengan demikian presentase terhadap pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Larantuka yaitu 81 %. Berdasarkan presentase tersebut maka pelaksanaan musrenbang kecamatan Larantuka dapat dinilai cukup baik. Salah satu faktor belum sesuai dalam musrenbang adalah bahwa diskusi yang bentuk konsultasi pemerintah dengan masyarakat dilakukan secara panel dengan waktu yang singkat sehingga tidak mungkin menampung semua usul saran yang akan dikemukakan oleh peserta musrenbang

Penilaian Kualitas Hasil Musrenbang

Presentasenya pelaksanaan 91%, dengan demikian dikatakan bahwa pada tahap kualitas hasil musrenbang kecamatan Larantuka dilaksanakan dengan baik. Semua aspirasi peserta diakomodir menjadi prioritas kecamatan. Namun hasil kesepakatan ini tidak diinformasikan kembali kepada masyarakat melalui delegasi masing-masing peserta,

akhirnya masyarakat tidak tahu lagi dengan hasil usulan program/kegiatan prioritas yang diusulkan ke tingkat kabupaten. informasi yang didapat peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa Perencanaan Partisipatif dalam musrenbang Kecamatan Larantuka merupakan proses yang kompleks dan beberapa aktor-aktor yang terlibat, yang kesemuanya bertemu untuk membahas dan memecahkan masalah-masalah disekitarnya.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Kecamatan Larantuka

1. Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan prasarana lingkungan tersaji pada tabel dibawah ini

No	Bentuk Partisipasi	Frekuensi
1	Ikut berpartisipasi	
	a. Aktif mengikuti pertemuan	28
	b. Aktif menyampaikan usulan	12
	c. Terlibat dalam pengambilan keputusan	10
2	Tidak ikut berpartisipasi	75
	Total	120

Sumber: hasil Observasi 2013

Mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat kecamatan. dalam analisis ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, sehingga dengan dikenalnya bentuk partisipasi tersebut dapat diketahui nilai dari partisipasi. Menurut Derick (dalam Bryant dan White, 1987:280) nilai partisipasi tidak hanya terletak pada ada tidaknya partisipasi itu. Hal yang terpenting adalah menentukan jenis partisipasi yang tepat untuk persoalan tertentu. Dalam hal ini ditekankan pentingnya mengenali klasifikasi atau tipe dan bentuk partisipasi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbang berpartisipasi dan lebih memilih sebagai pendengar saja. Dan tidak memberikan kontribusi masukan, atau apapun. Ini berarti kemauan dan kemampuan masyarakat yang terlibat untuk mengemukakan pendapatnya belum optimal. Kemauan berpartisipasi berhubungan dengan motivasi untuk mengadakan perubahan, sedangkan kemampuan berpartisipasi berhubungan dengan sumber daya manusia dan kemampuan belajar.

Dengan adanya sumbangan masukan berarti partisipasi telah memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat, serta mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah, tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk penetapan usulan prioritas kecamatan.

Dalam hal ini partisipasi masyarakat digunakan sebagai alat komunikasi, yaitu alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan, agar diwujudkan keputusan yang responsif. Sebuah perencanaan yang responsif menurut Mc Connel (1981) dalam Santosa dan Heroepoetri (2005:13) adalah proses pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan yang tanggap pada preferensi serta

kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan.

Dengan demikian maka terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat dalam Proses Musrenbang tingkat kecamatan. Dan bentuk partisipasi masyarakat yang didominasi oleh bentuk sumbangan masukan/saran/usul.

2. Kewenangan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih relatif terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas jelas sekali bahwa pengambilan keputusan dalam menentukan usulan prioritas pembangunan kecamatan adalah mufakat dari masyarakat dan pemerintah kecamatan. Begitu pula dengan perencanaan pembangunan kecamatan Larantuka, dimana aktor utama dalam menentukan program yang akan dilaksanakan adalah masyarakat dan pemerintah kecamatan. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam usulan dan saran masih kurang optimal, karena kurangnya kemampuan dalam menyampaikan saran dan gagasan tersebut. Selain itu, perbandingan prioritas kegiatan dari usulan masyarakat dan pemerintah daerah tidak sebanding.

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang mampu dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Usulan kegiatan yang disampaikan tidak didasarkan pada prioritas kebutuhannya, tapi hanya sekedar pengulangan usulan program yang sudah dilaksanakan sebelumnya, sehingga penentuan program kegiatan lebih banyak ditentukan oleh orang berkepentingan.

D. Analisis Faktor-Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

1. Analisis Faktor-faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktor-faktor yang berasal dari individu responden sendiri, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan

Berdasarkan hasil pengamatan faktor jenis kelamin yang terlibat dalam proses Musrenbang Kecamatan Larantuka terdiri dari dominan jenis kelamin pria. Menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita adalah berbeda. Dari distribusi faktor internal diatas terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi semuanya tergolong dalam usia produktif (20-65 tahun). Dari usia produktif tersebut dominan berusia matang (lebih dari 50 tahun). Hal ini menunjukkan adanya senioritas dalam berpartisipasi. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena dalam

masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan. Faktor pendidikan peserta maka diperoleh bahwa sebagian besar peserta memiliki pendidikan tamat Sarjana kemudian diikuti peserta dengan pendidikan sarjana muda kemudian berpendidikan SMA. Masyarakat yang terlibat dalam proses Musrenbang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah sampai tinggi (SMA sampai dengan Sarjana). Hal ini akan berpengaruh pada bentuk dan tata cara berpartisipasi.

2. Analisis Faktor-Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program kecuaci masyarakat. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat, dan peranan pihak swasta.

Peran Pemerintah dan swasta sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Pemahaman terhadap pembangunan akan memberikan dampak pada peran serta masyarakat dan keterlibatannya pada setiap proses perencanaan. Terutama dalam proses pembahasan untuk menentukan usulan kegiatan prioritas dalam musrenbang kecamatan.

:Berdasarkan informasi dari narasumber tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman tentang kondisi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah mewujudkan Visi dan Misi Bupati Flores Timur

Hal seperti yang dikemukakan oleh Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugorocho D (2006:46) Perencanaan pembangunan ditentukan oleh faktor : Pemahaman tentang instrumen perencanaan, dokumen kampanye presiden, dokumen pembangunan jangka menengah nasional (PJM-Nas), dokumen jangka menengah daerah (PJM-Daerah), rencana strategis departemen (renstrdep, untuk 5 tahunan), rencana strategis daerah (renstrada, untuk 5 tahunan), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD untuk 1 tahun), rencana Lembaga (RKL, untuk 1 tahun) atau rencana kerja Lembaga daerah (RKLD, untuk 1 tahun).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, secara umum belum optimal, dimana kehadiran masyarakat dalam musrenbang kecamatan sudah tinggi namun Pemberian ide dan gagasan terkait usul saran oleh masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan masih rendah sehingga hasil keputusan kegiatan program pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; Keputusan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah dan fasilitator kecamatan, sedangkan keterlibatan masyarakat masih rendah. Kondisi ini dikarenakan masyarakat kurang memahami proses perencanaan dan kurang mampu dalam mengidentifikasi permasalahan

prioritas. Selain itu, ide dan gagasan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, Kepala Desa/ lurah hanya sekedar ditampung saja, tanpa ada realisasi dalam penentuan usulan prioritas kecamatan. Kurangnya penyampaian ide dan gagasan dari masyarakat dikarenakan terbatasnya forum dalam menampung usulan masyarakat. Metode dalam mengusulkan pogram/kegiatan melalui forum musrenbang tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan program prioritas melalui bentuk tulisan seperti pembuatan proposal belum berjalan dengan baik, dimana masyarakat kesulitan untuk membuat proposal tersebut, karena kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam membuatnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam musrenbang di kecamatan Larantuka antara lain (1).Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berbentuk tingkat kehadiran dalam musrenbang, mengidentifikasi permasalahan pembangunan, memberikan ide atau gagasan, sampai pada tahapan penentuan usulan prioritas kecamatan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu masyarakat yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan/pekerjaan; (2). Faktor-Faktor eksternal menjadi hambatan proses musrenbang kecamatan berupa (a). peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat masih kurang. Karena kurangnya pembinaan dan pemberian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat, maka banyak peserta yang belum memahami mekanisme sistim perencanaan daerah, khususnya pada proses musrenbang dan akan menjadikan informasi tidak mencapai sasaran dengan baik. (b). Peranan para fasilitator menunjukkan, sebagian besar menyatakan fasilitator cukup memperhatikan aspirasi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman terkait perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan tingkat desa, teridentifikasinya kegiatan prioritas, hingga menjadi usulan prioritas kecamatan,

B. Saran

(1). Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif; (2).Pemerintah kecamatan perlu mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat Desa agar mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat;(3).Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat kecamatan, unsur pembangunan dan unsur masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan; (4). Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah Kecamatan, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kecamatan Larantuka. Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok edukasi.
- Burke, E.M. 2004. *Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan
- Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. (ed ketiga, terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaniora
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Moeliono, Laurike, 2001. Metode dan Analisis Focus group Discussion dalam Penelitian Kualitatif. dalam *Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian*, No. 11, Agustus 2001, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S. (2005). *Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perkotaan*. Makalah disampaikan pada Seminar Perwujudan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Perkotaan. Di Aula Barat ITB. 17 Desember 2005.
- Santosa, M. A dan Arimbi Heroepoetri. 2005. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Available from <http://www.pacific.net.id>;
- Wrihatnolo, Randi R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo